

# Peran Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam Menjaga Stabilitas Perdagangan Global

Sukma Nopelita Suci<sup>1</sup> , Kevin Hardianto<sup>2</sup> , Vicy Andriany<sup>3</sup> 

<sup>1</sup>UIN Mahmud Yunus Batusangkar

<sup>2</sup>UIN Mahmud Yunus Batusangkar

<sup>3</sup>UIN Mahmud Yunus Batusangkar

\*Correspondence author: [sukmanopelitasuci@gmail.com](mailto:sukmanopelitasuci@gmail.com), [kvnhrdnt@gmail.com](mailto:kvnhrdnt@gmail.com),  
[vicyandriany2208@gmail.com](mailto:vicyandriany2208@gmail.com)

Article Info: Received: ## Month ##### | Revised: ## Month ##### | Accepted: ## Month #####

**Abstract:** The World Trade Organization (WTO) plays a significant role in creating stability in international trade. As an institution tasked with regulating and facilitating global trade, the WTO aims to create a transparent, fair, and open trading system for all member countries. Through various agreements, dispute resolution mechanisms, and trade policy supervision, the WTO seeks to ensure the smooth flow of goods and services in the international market. However, challenges such as the gap between developed and developing countries, digitalization, and environmental sustainability issues continue to test the relevance of this organization. This study uses a qualitative method based on literature studies to explore the role of the WTO in addressing these challenges. The results show that although the WTO has made a major contribution to strengthening global economic cooperation, further efforts are needed to ensure inclusive involvement of all member countries and adapt trade rules to current global dynamics.

**Keywords:** WTO, international trade, global stability, dispute resolution, sustainable economy

**JEL Classification:** xxx

## 1. Introduction

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) merupakan sebuah lembaga internasional yang memiliki fungsi utama dalam mengatur perdagangan antarnegara. Tujuan utama pembentukan organisasi ini adalah untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih transparan dan terbuka. WTO resmi didirikan pada tanggal 1 Januari 1995, sebagai hasil kesepakatan dari perundingan perdagangan internasional dalam Putaran Uruguay (Uruguay Round). Lembaga ini menggantikan peran GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang sebelumnya menjalankan fungsi serupa. (Agnes E Manulu, dkk, 2024).

Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi global. Negara-negara di seluruh dunia saling berhubungan melalui ekspor dan impor untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus memperluas pasar mereka. Namun, perdagangan internasional sering menghadapi tantangan, seperti proteksionisme, ketidakpastian kebijakan ekonomi, hingga konflik dagang yang dapat mengganggu stabilitas global (Hoekman & Kostecki, 2009). Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) hadir untuk menciptakan keteraturan dalam perdagangan internasional. Sebagai

lembaga internasional, WTO berperan menetapkan aturan perdagangan yang adil, menyelesaikan sengketa antarnegara, dan memastikan kelancaran arus barang dan jasa (WTO, n.d.). Meski demikian, efektivitas WTO sering diperdebatkan. Ada pandangan yang menyebutkan bahwa organisasi ini lebih menguntungkan negara maju dibanding negara berkembang. Sementara itu, perubahan global seperti digitalisasi dan isu keberlanjutan lingkungan juga menjadi tantangan baru yang harus dihadapi WTO (Mattoo & Staiger, 2020).

Secara teori, liberalisme dalam hubungan internasional menjelaskan bahwa kerja sama antarnegara dapat menciptakan stabilitas dan kemakmuran bersama. WTO, yang dibentuk berdasarkan prinsip ini, memiliki misi untuk mendorong perdagangan yang lebih terbuka dan berbasis aturan (Bagwell & Staiger, 2002). Namun, dalam praktiknya, upaya ini sering terkendala oleh kepentingan nasional masing-masing negara, terutama ketika muncul konflik dagang atau perbedaan kekuatan ekonomi antara negara maju dan berkembang. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam peran WTO dalam menjaga stabilitas perdagangan global, sekaligus mencari solusi agar organisasi ini tetap relevan dengan tantangan zaman.

## **2. Methods**

Penulisan ini merupakan penelitian pustaka yang mengandalkan sumber data dari buku, artikel jurnal, dan referensi lainnya. Penelitian pustaka adalah metode pengumpulan data yang melibatkan berbagai sumber, seperti buku, jurnal, berita, dokumentasi, internet, dan literatur. Hasil yang diperoleh dari pendekatan kualitatif tidak bertujuan untuk generalisasi, melainkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah dan fenomena yang diteliti.

Pendekatan kualitatif ini berfokus pada penjelasan dan pemahaman dari sumber-sumber yang diteliti, serta membantu penulis dalam menganalisis permasalahan yang sedang dikaji. Fokus penelitian ini adalah mengenai Strategi Pemasaran Perusahaan Reksadana untuk Menarik Generasi Milenial di Era Digital.

## **3. Results and Discussion**

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) merupakan sebuah lembaga internasional yang memiliki fungsi utama dalam mengatur perdagangan antarnegara. Tujuan utama pembentukan organisasi ini adalah untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih transparan dan terbuka. WTO resmi didirikan pada tanggal 1 Januari 1995, sebagai hasil kesepakatan dari perundingan perdagangan internasional dalam Putaran Uruguay (Uruguay Round). Lembaga ini menggantikan peran GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang sebelumnya menjalankan fungsi serupa. (Agnes E Manulu, dkk, 2024)

### **Fasilitasi Perjanjian Perdagangan**

WTO berperan penting dalam membentuk kerangka aturan perdagangan internasional yang adil dan dapat diterapkan oleh semua negara anggota. Melalui perjanjian seperti General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), WTO berhasil menurunkan hambatan tarif dan meningkatkan akses pasar secara global. Selain itu, melalui Trade Facilitation Agreement (TFA), WTO mendukung pengurangan birokrasi dan prosedur yang rumit, sehingga mempercepat aliran barang lintas negara. Upaya ini tidak hanya

meningkatkan efisiensi perdagangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang yang sebelumnya menghadapi kesulitan dalam memasuki pasar internasional (WTO, n.d.).

Selain itu, WTO juga mendorong negara-negara anggota untuk berkomitmen pada peraturan yang telah disepakati bersama melalui mekanisme *periodic trade policy reviews*. Mekanisme ini memastikan bahwa semua anggota mematuhi standar yang sama, menciptakan stabilitas dan kepercayaan dalam sistem perdagangan global (Hoekman & Kostecki, 2009).

### **Penyelesaian Sengketa Dagang**

Salah satu peran utama WTO adalah menyediakan mekanisme formal untuk menyelesaikan sengketa dagang antarnegara melalui sistem yang disebut *Dispute Settlement Mechanism (DSM)*. Mekanisme ini memungkinkan negara-negara anggota WTO untuk mengajukan keluhan jika mereka merasa kebijakan perdagangan negara lain melanggar aturan yang telah disepakati bersama. Proses penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui jalur hukum yang terstruktur, dimulai dari konsultasi, dilanjutkan dengan pembentukan panel ahli yang bertugas memberikan keputusan, hingga tahap banding jika diperlukan (Hoekman & Kostecki, 2009).

Melalui *Dispute Settlement Mechanism (DSM)*, WTO dapat mencegah konflik dagang antarnegara berkembang menjadi perang dagang yang lebih besar. Mekanisme ini juga memastikan bahwa semua anggota, baik negara maju maupun negara berkembang, memiliki hak yang sama untuk mengajukan sengketa atau membela diri. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus besar seperti sengketa antara Uni Eropa dan Amerika Serikat terkait subsidi pesawat (Airbus dan Boeing), *Dispute Settlement Mechanism (DSM)* mampu memberikan keputusan yang berdasar pada aturan perdagangan internasional dan mendorong solusi yang adil bagi kedua pihak (Mattoo & Staiger, 2020).

Mekanisme ini tidak hanya mengurangi eskalasi konflik, tetapi juga memperkuat legitimasi WTO sebagai lembaga yang menjamin keadilan dalam perdagangan internasional. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait pelaksanaan putusan di lapangan, yang terkadang menghadapi resistensi dari pihak yang kalah dalam sengketa (Hoekman & Kostecki, 2009).

### **Pengawasan Kebijakan Perdagangan**

Salah satu fungsi penting WTO adalah memantau kebijakan perdagangan negara-negara anggota untuk memastikan kesesuaian dengan aturan yang telah disepakati (Vestyo Gelcheri Amalo & Hizkia Hardi, 2023). Melalui mekanisme *Trade Policy Review (TPR)*, WTO meminta negara-negara anggota untuk melaporkan kebijakannya secara berkala. Laporan ini kemudian dikaji untuk menilai dampaknya terhadap sistem perdagangan global.

Pengawasan ini bertujuan menciptakan transparansi, sehingga negara-negara lain dapat mengetahui arah kebijakan yang sedang diterapkan. Dengan adanya transparansi tersebut, diharapkan praktik-praktik proteksionisme yang tidak sesuai aturan dapat diminimalkan. Sebagai contoh, selama krisis ekonomi global, *TPR (Trade Policy Review)* membantu mengidentifikasi beberapa kebijakan perdagangan yang berpotensi menghambat

perdagangan internasional dan memberi peluang bagi negara-negara untuk menyesuaikannya (M. Pekkanen, dkk, 2019)

Namun, tantangan yang sering muncul adalah keterbatasan sumber daya, baik dari pihak WTO maupun negara-negara berkembang yang sering kali kesulitan melaporkan kebijakannya secara rinci. Hal ini menunjukkan pentingnya dukungan lebih besar bagi negara-negara dengan kapasitas terbatas agar dapat memenuhi kewajibannya.

### **Peningkatan Kapasitas Negara Berkembang**

WTO memahami bahwa kesenjangan ekonomi dan kapasitas antarnegara anggota merupakan tantangan besar dalam menciptakan perdagangan global yang adil. Negara-negara berkembang sering kali menghadapi hambatan struktural yang membuat mereka sulit bersaing di pasar internasional. Untuk mengatasi hal ini, WTO menyediakan berbagai program pelatihan dan bantuan teknis guna meningkatkan kemampuan negara-negara berkembang dalam memanfaatkan peluang perdagangan. Salah satu program utama WTO adalah Enhanced Integrated Framework (EIF), yang dirancang khusus untuk membantu negara-negara miskin membangun infrastruktur perdagangan yang memadai (Yudi Rusfiana & Dedi Sukarno, 2022). Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan sumber daya manusia, seperti pelatihan pejabat pemerintah dalam merumuskan kebijakan perdagangan yang strategis dan efektif. Dengan adanya EIF, negara-negara miskin diharapkan mampu meningkatkan partisipasinya dalam perdagangan global dan memperbaiki posisi ekonominya. Selain itu, WTO secara rutin mengadakan lokakarya, seminar, dan program pelatihan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aturan perdagangan internasional. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu negara berkembang menyusun kebijakan yang sesuai dengan aturan WTO sehingga mereka dapat meningkatkan daya saing produk unggulannya, terutama di pasar global (Serfianto Dibyo Purnomo, dkk, 2013). Misalnya, produk-produk pertanian atau hasil kerajinan lokal sering kali memiliki potensi besar untuk diekspor, tetapi terkendala oleh kurangnya pengetahuan tentang standar internasional atau hambatan teknis di negara tujuan. Namun, salah satu masalah utama yang dihadapi negara berkembang adalah sulitnya mendapatkan akses yang adil ke pasar negara maju.

Meskipun WTO telah mendorong penerapan skema preferensi seperti penghapusan tarif untuk produk-produk dari negara berkembang, implementasi kebijakan ini sering kali tidak konsisten. Sebagai contoh, beberapa negara maju memberlakukan standar yang sangat ketat untuk produk impor, yang pada akhirnya menjadi penghalang terselubung bagi negara berkembang untuk memasuki pasar tersebut. Untuk mengatasi tantangan ini, WTO terus mendorong adanya dialog yang intensif antara negara maju dan negara berkembang (Daryanto Setiawan, 2017). Dialog ini bertujuan untuk menciptakan kesepakatan yang lebih inklusif dan menghilangkan hambatan-hambatan yang tidak perlu. WTO juga berupaya memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kebijakan perdagangan negara maju, sehingga negara berkembang dapat memperoleh perlakuan yang lebih adil di pasar internasional.

### **Respon terhadap Krisis Global**

WTO memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi berbagai krisis global yang memengaruhi perdagangan internasional (Egi Naufal Daffa Zaki, dkk, 2024). Contohnya, selama pandemi COVID-19, WTO berupaya memastikan agar perdagangan

barang-barang penting, seperti obat-obatan, alat kesehatan, dan bahan makanan pokok, tetap berjalan lancar. Organisasi ini mendorong negara-negara anggota untuk tidak memberlakukan pembatasan ekspor yang berlebihan, karena hal tersebut dapat menghambat distribusi barang ke negara lain yang sangat membutuhkan. Selain itu, WTO juga memfasilitasi diskusi antarnegara untuk mencari solusi bersama, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi. Di luar pandemi, WTO juga mengambil langkah-langkah untuk menangani isu-isu lingkungan yang berkaitan dengan perdagangan global. Salah satu contohnya adalah upaya mengurangi subsidi bahan bakar fosil yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan subsidi perikanan yang merusak ekosistem laut (Indriyani Rachman, 2023).

Langkah ini bertujuan untuk menciptakan perdagangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan. Selain itu, WTO juga mendorong negara-negara anggota untuk menghapus hambatan perdagangan pada produk-produk ramah lingkungan, seperti panel surya dan kendaraan listrik, agar lebih banyak digunakan secara global. Namun, respons WTO terhadap krisis global tidak selalu berjalan mulus. Seringkali ada perbedaan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju, misalnya, cenderung mendorong penerapan kebijakan lingkungan yang lebih ketat, sementara negara berkembang khawatir kebijakan tersebut akan membatasi peluang mereka untuk bersaing di pasar global. Di sisi lain, beberapa negara lebih memilih untuk melindungi pasar domestiknya dengan kebijakan proteksionis, yang justru menghambat upaya kerja sama internasional yang lebih luas. Selain itu, WTO juga dihadapkan pada tantangan yang timbul akibat konflik perdagangan antarnegara besar, yang dapat mengganggu rantai pasok global. Dalam situasi seperti ini, WTO berusaha menjadi mediator dengan memfasilitasi dialog antarnegara untuk mencegah konflik yang lebih besar. Meskipun menghadapi banyak hambatan, peran WTO tetap krusial dalam menjaga stabilitas perdagangan global dan memastikan bahwa kepentingan semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, tetap terakomodasi (Muhamad Hisyam & Cahyo Pamungkas, 2017).

### **Digitalisasi dan Perdagangan Internasional**

Digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam pola perdagangan internasional (Muhammad Dwi Arif, 2024). Hal ini menjadi salah satu tantangan utama karena banyak negara anggota belum memiliki aturan yang jelas terkait perdagangan digital, seperti e-commerce, aliran data lintas negara, dan perlindungan konsumen di dunia maya. Saat ini, WTO sedang membahas inisiatif Joint Statement Initiative on E-commerce, yang bertujuan untuk menciptakan aturan internasional dalam perdagangan digital. Salah satu fokusnya adalah penghapusan hambatan dalam perdagangan barang dan jasa digital, seperti pajak yang tidak proporsional terhadap layanan digital atau pembatasan akses terhadap data. Namun, perdebatan sering terjadi karena perbedaan kepentingan antara negara maju dan berkembang (Melyana R Pugu, 2024). Negara maju cenderung mendukung liberalisasi perdagangan digital sepenuhnya, sementara negara berkembang khawatir bahwa aturan ini akan menguntungkan perusahaan multinasional besar dari negara maju, sementara mereka sendiri belum siap secara infrastruktur digital. Sebagai contoh, dalam perjanjian yang melibatkan hak kekayaan intelektual (TRIPS Agreement), negara maju mendorong perlindungan yang ketat atas paten, merek dagang, dan hak cipta. Sementara itu, negara berkembang merasa aturan ini membatasi akses mereka terhadap teknologi dan obat-obatan yang sangat dibutuhkan untuk

pembangunan. Selain itu, negara maju cenderung memiliki lebih banyak sumber daya untuk memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa WTO, sedangkan negara berkembang sering terkendala oleh biaya dan keterbatasan ahli hukum internasional.

#### **4. Conclusion**

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa WTO memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perdagangan global dengan menyediakan kerangka aturan yang adil, mekanisme penyelesaian sengketa, dan pengawasan kebijakan perdagangan. Namun, efektivitas organisasi ini sering terkendala oleh perbedaan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang, terutama dalam konteks isu digitalisasi, perlindungan lingkungan, dan akses pasar. WTO juga menghadapi tantangan untuk meningkatkan kapasitas negara-negara berkembang agar lebih kompetitif di pasar global melalui pelatihan, bantuan teknis, dan penghapusan hambatan perdagangan. Meskipun telah banyak berkontribusi, WTO perlu beradaptasi dengan perubahan global untuk tetap relevan. Langkah-langkah seperti penguatan dialog antarnegara, penyempurnaan perjanjian perdagangan, serta peningkatan transparansi dan inklusivitas sangat dibutuhkan. Dengan begitu, WTO dapat terus memainkan peran sebagai pilar utama dalam mendukung stabilitas ekonomi dunia yang berkelanjutan.

#### **References**

- Amalo, Vestyo Gelcheri & Hardi, Hizkia. (2023). KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL : TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL DAN DAMPAK EKONOMI DI INDONESIA . *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol 2 No 3.
- Arif, Muhammad Dwi. (2024). Pola Perdagangan Internasional dalam Era Globalisasi Sebuah Kajian Deskriptif. *Jurnal Pendidikan Manajemen Transportasi* Vol 4(3).
- Bagwell, K., & Staiger, R. W. (2002). *The Economics of the World Trading System*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Hisyam, Muhamad & Pamungkas, Cahyo. (2017). *Indonesia, Globalisasi, dan Global Village*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Hoekman, B. M., & Kostecki, M. M. (2009). *The Political Economy of the World Trading System: The WTO and Beyond*. Oxford: Oxford University Press.
- Manulu, Agnes E, dkk. (2024). PERAN WTO DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL. *Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis* Vol. 2
- Mattoo, A., & Staiger, R. W. (2020). "Trade Wars: What Do They Mean? Why Are They Happening Now? What Are the Costs?". *Economic Policy*, 35(102), 561–584.
- Pekkanen. M, dkk. 2019. *HANDBOOK HUBUNGA INTERNASIONAL ASIA*. Bandung: Nusa Media
- Pugu, Melyana R. (2024). *Diplomasi dan Negosiasi*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

- Purnomo, Serfianto Dibyو dkk. (2013). *Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*. Jogja: Galangpress Center
- Purnomo, Serfianto Dibyو dkk. (2013). *Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*. Jogja: Galangpress Center
- Rachman, Indriyani. (2023). *Aksi Nyata Berbasis SDGs. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia*
- Rusfiana, Yudi & Sukarno, Dedi. (2022). *Pengembangan Organisasi Pemerintah. Jawa Barat: Elfatih Media Insani*
- Setiawan, Daryanto. (2017). *Kebijakan Komunikasi Internasional Indonesia. JURNAL SIMBOLIKA* Vol 3 (1)
- World Trade Organization. (2020). *Trade and COVID-19*.
- Zaki, Egi Naufal Daffa, dkk. (2024). *Perdagangan Internasional. MIJI: Merdeka Indonesia Jurnal Internasional* Vol 4 (2).